



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA.2019

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat izin dan ridha-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Oleh karenanya Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan sebagai alat ukur terhadap capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan baik dalam penyajian formulasinya maupun dalam penyajian isinya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diperlukan bagi kesempurnaan laporan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Juni 2020

KEPALA DINAS,

Ir. SULKA S LATIEF, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Susunan Organisasi.....	1
1.2. Tugas Pokok.....	5
1.3. Fungsi.....	8
1.4. Isu Startegis.....	16
1.5. Sistematika Penyajian.....	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	20
2.1. Perencanaan.....	20
2.2. Penetapan Kinerja.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja Sasaran / IKU	28
3.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran /IKU	40
3.3. Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP.....	89
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Sebaran PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan golongan/ruang.....	3
2. Sebaran PNSD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
3. Data Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2019.....	4
4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	17
5. Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2019.....	26
6. Capaian Kinerja Sasaran /IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2019	29
7. Predikat Capaian Kinerja Sasaran /IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2019	30
8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I.....	31
9. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran I dan Capaian terhadap target RPJMD	32
10. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	34
11. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran I.....	34
12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran II	37
13. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran II dan Capaian terhadap target RPJMD	38
14. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan tahun 2015 – 2019.....	40

15. Capaian Bina Kelompok Nelayan tahun 2017 – 2019	44
16. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran II	45
17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran III.....	53
18. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran III dan Capaian terhadap target RPJMD	53
19. Realisasi Ekspor Tahun 2017 – 2019	57
20. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran III.....	58
21. Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV.....	61
22. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran IV dan Capaian terhadap target RPJMD	61
23. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran IV	63
24. Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV.....	66
25. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran V dan Capaian terhadap target RPJMD	67
26. Realisasi Kawasan Lindung Perairan Tahun 2015 – 2019	68
27. Realisasi Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis Yang aman	69
28. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran V	70
29. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	74
30. Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2019.....	75
31. Realisasi keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan TA. 2019	76

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Perkembangan Produksi Perikanan.....	39
2. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Produksi Ikan Daerah....	41
3. Perkembangan Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sul Sel Tahun 2014 - 2019.....	43
4. Perkembangan Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014- 2019	54



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama tahun 2019 sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang terdiri dari 5 sasaran strategis (SS) dengan 12 indikator kinerja.

Secara garis besar, uraian atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Capaian indikator sasaran tersebut adalah :
 - a. Nilai SAKIP OPD ditargetkan 80,85 % terealisasi 85,61 % atau mencapai target sebesar 105,89 %
 - b. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah ditargetkan sebesar 95% terealisasi 135,25% atau mencapai target sebesar 142,36 %.
 - c. ASN dengan nilai SKP kategori baik ditargetkan 82 % terealisasi 99,48 % atau mencapai target sebesar 142,36 %
2. Sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi . Capaian indikator sasaran tersebut adalah :
 - a. Produksi perikanan ditargetkan sebesar 5.117.387,5 terealisasi 4.061.326 atau mencapai target sebesar 79,36 %
 - b. Produksi perikananKelompokNelayan ditargetkan sebesar 80.010,21 terealisasi sebesar 174.620,24 atau mencapai target sebesar 218,24 %
 - c. Kontribusi PDRB Perikanan ditargetkan sebesar 8,6 % terealisasi 8,4 % atau mencapai target sebesar 97,67 %
 - d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan ditargetkan 30,18 % terealisasi 17,52 % atau mencapai target 58,05 %

3. Sasaran meningkatnya Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan indikator sasaran :
 - a. Konsumsi Ikan ditargetkan sebesar 53,6 kg/kap/tahun terealisasi 64,7 % atau mencapai target 120,71 %.
 - b. Kontribusi Ekspor Perikanan ditargetkan sebesar 5,63 % terealisasi 8,08 % atau mencapai target 143,55 %
4. Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan indikator sasaran:
 - a. Nilai tukar nelayan (NTN) ditargetkan sebesar 107.79 terealisasi 107,60 atau mencapai target sebesar 99,82 %
5. Sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan dengan indikator sasaran :
 - a. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial ditargetkan sebesar 0.26 % terealisasi 1,01 % atau mencapai target sebesar 388,46 %
 - b. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman ditargetkan sebesar 49,10 % terealisasi 58,69 % atau mencapai target sebesar 119,523 %

Namun dibalik keberhasilan itu masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yaitu :

1. Produksi perikanan tidak mencapai target karena terjadi perlambatan produksi di beberapa komoditas unggulan seperti udang dan rumput laut
2. Perlambatan pertumbuhan kontribusi PDRB perikanan disebabkan masih rendahnya kontribusi nilai tambah produksi karena mayoritas produk dijual dalam bentuk raw material
3. Tidak tercapainya target cakupan bina kelompok nelayan disebabkan Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan

kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratan sesuai yang dipersyaratkan.

S o l u s i :

1. Melakukan desiminasi inovasi teknologi budidaya udang dan rumput laut melalui percontohan budidaya yang diharapkan dapat mendorong proses penyebaran dan penerapan teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi sebagai komoditi ekspor yang bernilai ekonomi tinggi.
2. Melaksanakan program hilirisasi yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan yang akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Melibatkan penyuluh dalam pembinaan kelompok untuk memastikan kesiapan kelompok.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan.

Adapun uraian Adapun uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada struktural organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Pergub 86 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1.1. SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi perangkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian
3. Kepala Bidang (empat)
4. Kepala UPTD
5. Kepala Cabang Dinas Kelautan (CDK)

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :





Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang penting adalah faktor Sumberdaya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sul-Sel sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran PNS Dinas Kelautan dan PerikananProv. Sul-Sel TA. 2019 Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Gol. Ruang	A		B		C		D		Jumlah		Total
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	
1	I	0	0	2	0	0	1	0	0	2	1	3
2	II	1	0	5	0	3	0	7	2	16	2	18
3	III	4	6	10	9	21	34	29	28	64	77	141
4	IV	12	9	11	1	1	0	0	0	24	10	34
Jumlah		17	15	28	10	25	35	36	30	96	90	196

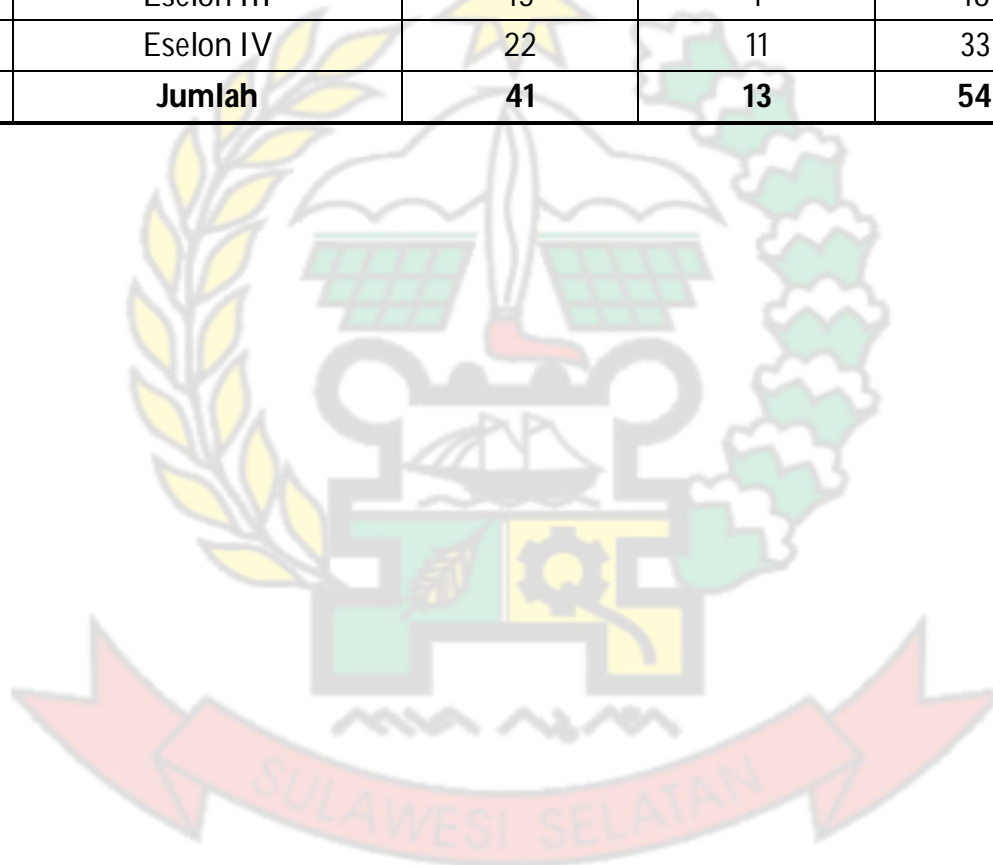
Sebaran PNSD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2. Sebaran PNSD Dinas Kelautan dan PerikananProv. Sul-Sel TA. 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S3	2	1	3
2	S2	29	20	49
3	S1	48	65	113
4	Sarjana Muda	8	1	9
5	SMA	17	2	19
6	SMP	0	1	1
7	SD	2	0	2
Jumlah		106	90	196

**Tabel 3. Data Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan PerikananProv.
Sul-Sel TA. 2019**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	15	1	16
3	Eselon IV	22	11	33
	Jumlah	41	13	54



1.2. TUGAS POKOK

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Sekretaris

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mengatur dan mengawasi kegiatan pada :

- **Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian, dan hukum.

- **Sub. Bagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

- **Sub. Bagian Program**

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.

Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan dan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan tangkap.

Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordiansi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan 2

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

UPT Balai Penerapan Mutu Produk Hasil Perikanan

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan.

UPT Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional produksi dan pelayanan teknik budidaya ikan air payau dan laut, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan.

Cabang Dinas Kelautan

Dengan Peraturan Gubernur No.03 Tahun 2018 telah, dibentuk Cabang Dinas Kelautan, masing-masing:

- a. Cabang Dinas Kepulauan Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Cabang Dinas Pangkajene dan Kepulauan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkep yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Cabang Dinas Luwu Raya, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;

- d. Cabang Dinas Ajatappareng, Kelas A berkedudukan di Kota Pare-Pare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang;
- e. Cabang Dinas Bosowasi, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai;
- f. Cabang Dinas Wilayah Selatan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba;
- g. Cabang Dinas Wilayah Mamminasata, Kelas A berkedudukan di Kota Makassar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar;
- h. Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja.

1.3. FUNGSI

Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

• Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

• Sub Bagian Program

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

- **Sub Bagian Keuangan**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi di Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- f. penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan
- g. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- h. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perikanan Tangkap:



- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Perikanan Tangkap;
- b. pelaksanaan penyiapan pengelolaan, penangkapan ikan diwilayah laut sampai dengan 12 mil, pembinaan dan penguatan kenelayanan;
- c. pelaksanaan penyiapan rekomendasi untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Pemasangan Rumpon, dan penerbitan buku kapal perikanan 5 GT sampai dengan 30 GT ,
- d. pelaksanaan penyiapan rekomendasi untuk penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengaturan, penguatan di bidang Perikanan Tangkap;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan Tangkap;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Tangkap ; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- d. pemberian pembinaan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan 2

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan Pelabuhan Perikanan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan Pelabuhan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Pelabuhan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT BALAI PENERAPAN MUTU PRODUK HASIL PERIKANAN

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan teknik budidaya ikan air payau/laut, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan teknik budidaya ikan air payau/laut, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan teknik budidaya ikan air payau/laut, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

CABANG DINAS KELAUTAN

Kepala Cabang Dinas Kelautan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diatas telah ditetapkan target pembangunan kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Capaian Perjanjian kinerja tersebut dituangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2019 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sul-Sel tahun 2019 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban yang mengacu pada Perpres RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis, maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari permasalahan pembangunan daerah yaitu :

1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah,
2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing,
3. Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang,
4. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok,
5. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi,
6. Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing,
7. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai
8. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran.



Tabel 4 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana tidak terstruktur
2	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penguatan aparatur yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
3	Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal	Pembinaan terhadap nelayan dan petugas pelabuhan belum Optimal
4	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
5	Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi	Kurangnya informasi akses perbankan	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan terbatas
6	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	Kurangnya sarana prasarana dan SDM penegak hukum di laut
7	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai	Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	Dokumen RZWP3K dan rencana alokasi ruang belum dimanfaatkan
8	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Kebijakan "limited access" belum diterapkan secara menyeluruh.
9	Mekanisme pengumpulan data perikanan masif bersifat masif dan Belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi rencana pembangunan kelautan dan perikanan/kebijakan sektor kelautan dan perikanan serta isu startegis yang sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.
2. Membandingkan antara relaisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup

Simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. PERENCANAAN

Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**, dengan Misi yang diamanahkan adalah **Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan**. Dalam pencapaian visi, misi dan sasaran di atas tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Salah satu indikator makro ekonomi pada pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan adalah pertumbuhan produksi perikanan. Indikator ini diarahkan untuk mendukung kebijakan **Hilirisasi Komoditas Unggulan Sulawesi Selatan** dalam rangka merenspon kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan nasional yaitu **Kemaritiman dan Kelautan**. Selama kurun waktu 2013-2017, data pertumbuhan produksi perikanan Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positif terutama pada Usaha Perikanan Budidaya, namun sejalan pencapaian pertumbuhan produksi di beberapa daerah masih terdapat beberapa permasalahan baik secara teknis, sosial dan lingkungan.



Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Adapun Produksi Perikanan Sulawesi Selatan bersumber dari usaha perikanan penangkapan (Laut & Perairan Umum) dan usaha perikanan budidaya (Laut, Tambak, Kolam dan Sawah). Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan budidaya dan upaya penangkapan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan ke depan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu hilirisasi dan optimalisasi kegiatan produksi melalui pengembangan inovasi teknologi produktif, peningkatan daya saing melalui penanganan dan penerapan teknologi pengolahan produk hasil perikanan sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan berkarakter, dan pengembangan mekanisme dan jaringan pemasaran yang inklusif. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan terhadap pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan, diantaranya: (1) Pembangunan Sektor Perikanan Budidaya kedepan menekankan pada peningkatan produksi melalui upaya rekayasa teknologi dan upaya perbaikan lingkungan/habitat pemeliharaan; (2) Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berbasis pada tiga fokus pengembangan, yaitu inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan (*fishing technology*), penguasaan dan pengembangan pengetahuan terhadap target tangkapan (*fish target*), dan peningkatan pemahaman terhadap daerah penangkapan ikan (*fishing ground*); (3)

Adanya Gerakan Peningkatan Produk-si Komoditas terhadap 7 komoditi unggulan seperti udang, rumput laut, kepiting, cumi-cumi, bandeng, kakap kerapu dan tuna cakalang tongkol sebagai wujud dari Hilirisasi Perikanan dan Kelautan; (4) semakin bergairahnya masyarakat pembudidaya untuk berusaha karena lingkungan sumberdaya perikanan yang mendukung; (5) adanya trend dukungan kebutuhan akan semakin besar sehingga ada jaminan pasar.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

VISI : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”							
MISI 5 : Meningkatkan produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 1	Arah Kebijakan Tahun 2	Arah Kebijakan Tahun 3	Arah Kebijakan Tahun 4	Arah Kebijakan Tahun 5
Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	Meningkatkannya produktivitas dan daya saing produk sektor perikanan berbasis sumberdaya alam	1. Perbaikan Kualitas Produksi 2. Penguatan Kelembagaan 3. Hilirisasi	Hilirisasi Pengelolaan produk berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan	Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis	Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis	Pemantapan hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis	Pemantapan hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritisasi kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan Pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan

program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi Sub.Sektor Perikanan terhadap PDRB Sektor Pertanian
2. Meningkatnya volume dan nilai produksi kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan
4. Meningkatnya produksi komoditas unggulan
5. Meningkatnya Konsumsi Ikan
6. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Kesepakatan dalam pencapaian target indikator terutama pada peningkatan Produksi Perikanan, Garam, Produksi Olahan dan Jumlah POKMASWAS yang dibina dalam rangka mendukung persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka Hilirisasi Perikanan diarahkan dukungan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya, Pengembangan kluster Produksi, Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pengolahan dan Perluasan Pasar Produk Perikanan, Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Perbaikan mutu dan daya saing produk kelautan dan perikanan, Pembinaan para pelaku usaha kelautan dan perikanan serta Kemitraan pelaku dengan sumber inovasi dalam rangka peningkatan produksi
3. Penataan Sistem dan Manajemen pada Pengembangan Komoditas dan produk unggulan dari Hulu ke Hilir dengan berorientasi pasar, Pengembangan konektivitas dan infrastruktur, Pengembangan Usaha dan Investasi, Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk, Pengembangan IPTEK dan SDM, Pemberdayaan masyarakat, Fasilitasi Pengembangan Wirausaha dan Fokus pada Pengarusutamaan Gender.
4. Penataan dan Peningkatan Manajemen dalam Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan.

5. Pembangunan kemaritiman diarahkan Penatakelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengembangan infrastruktur.

Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2019 telah sesuai dengan RPJMD dijelaskan sebagai berikut :

Program Hilirisasi Perikanan

Program ini adalah program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya perikanan dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan hilirisasi komoditas berbasis sumberdaya. Selain itu adanya kebijakan Nasional melalui **Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Perikanan** seperti **pengembangan fasilitas pelabuhan, pengembangan Perbenihan, pengembangan sarpras pengawasan dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya perairan yang dialokasikan melalui dana DAK.**

Program Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi terutama komoditi unggulan. Adapun tujuan dari program ini yaitu (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan berdasarkan konsep PUG dalam kegiatan agribisnis terutama pengembangan rumput laut dan 2) Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun komoditas unggulan yang dimaksud adalah udang, bandeng dan rumput laut serta tuna cakalang tongkol. Program ini diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan nelayan dan keluarganya melalui peningkatan pendapatan. Upaya tersebut dicapai melalui (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Usaha, (2) Peningkatan segmen usaha hulu-hilir yang terkait dan terintegrasi usahanya satu kawasan melalui pendekatan agribisnis salah satunya dengan pengembangan pelabuhan perikanan. Peningkatan produksi Perikanan Tangkap diarahkan pada komoditi yang mewakili nilai ekonomis tinggi dan peningkatan pasar yang luas .

Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, dan wanita nelayan (konsep PUG) melalui usaha – usaha pendampingan teknologi, manajemen usaha dan penetapan waktu tanam dan penguatan modal usaha dengan kegiatan, kemudian pengembangan



dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir sehingga dalam mendorong arah kebijakan tersebut . Program tersebut diarahkan untuk peningkatan nilai tambah melalui peningkatan mutu dan jenis olahan hasil perikanan, usaha ini akan menciptakan peningkatan dan pemerataan pendapatan bagi para pelaku usaha olahan hasil perikanan dan pemberdayaan masyarakat (konsep PUG) dalam diversifikasi olahan. Tujuan pemasaran akan tercapai melalui usaha (1) Peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah pelaku usaha, (2) Peningkatan sarana olahan dan kelembagaan usaha, (3) Peningkatan informasi pasar, (4) Peningkatan ketersediaan bahan baku olahan.

Program Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut

Program tersebut diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya dan pengawasan distribusi produk perikanan dari hulu ke hilir. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan untuk pembinaan, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatkan pelestarian lingkungan sumberdaya melalui upaya perlindungan dan pemulihan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. Tujuan yang dapat dicapai adalah meningkatkan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan .

2.2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mempunyai komitmen kinerja yang terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2019. Target ditetapkan untuk indikator kinerja, baik indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (*input, output, outcome*). Target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Penetapan Kinerja / IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	KETERANGAN
I. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1.	Nilai saki OPD (((80,85	
	2.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan))))	95%	
	3.	% ASN Nilai SKP kategori baik (((82	
II. Meningkatkan produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	4.	Produksi perikanan (ton(5.117.387,52	
	5.	produksi perikanan kelompok nelayan (ton(80.010,21	
	6.	Kontribusi PDRB Perikanan (((8,6	
	7.	Cakupan bina kelompok nelayan	30,18	
III. Meningkatkan konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	8.	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun(53,06	
	9.	Kontribusi ekspor perikanan (((5,63	
IV. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan	10.	Nilai tukar nelayan (NTN(107,79	

pul au- pul au kecil				
V. Meningkatnya kel estarian dan pengendal ian pemanfaatan sumberdaya al am kel autan dan perikanan	11.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap tol tal luas perairan teritorial (((0,26	
	12.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dal am batasan biol ogis yang aman (((49,1	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indicator makro yang diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)		
50	SANGAT RENDAH / SR	
50.1 65	RENDAH / R	
65.1 75	SEDANG / S	
75.1 90	TINGGI / T	
90.1	SANGAT tinggi /ST)	

Sumber :Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indicator sasaran menggunakan asumsi I : jika **semakin tinggi**

realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik** atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/jelek** adalah :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya **realisasi semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN/IKU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019.

Hasil pengukuran capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan pada table berikut :



Tabel 6. Capaian Kinerja Sasarab /IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

Sasaran dan Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran I :	1	Nilai Sakip OPD (%)	80,85	85,61	105,89
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	2	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	95,00	135,25	142,36
	3	ASN Nilai SKP Kategori Baik (%)	82,00	99,48	121,33
Sasaran II :	4	Produksi perikanan (Ton)	5.117.387,5	4.061.326	79,36
Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	5	Produksi perikananKelompokNelayan (Ton)	80.010,21	174.620,24	218,24
	6	Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8,6	8,4	97,67
	7	Cakupan Bina KelompokNelayan (%)	30,18	17,52	58,05
Sasaran III : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	8	Konsumsi Ikan(kg/kap/th)	53,6	64,7	120,71
	9	Kontribusi Ekspor Perikanan (%)	5,63	8,08	143,55
Sasaran IV : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	10	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,79	107,60	99,82
Sasaran V : Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	11	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	0,26	1,01	388,46
	12	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	49,10	58,69	119,53

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah indikator	Rata-Rata Capaian					Predikat
			≤ 50	51 ≤ 65	66 ≤ 75	76 ≤ 90	≥ 91	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	3					123,19	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	4					113,33	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	2					132,13	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	1					99,82	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya	2					254,0	Sangat Tinggi

	alam kelautan dan perikanan							
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab target yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan prestasi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2019 sebagaimana berikut.

SASARAN I :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Terdapat 3 indikator dalam mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah yaitu (1) nilai SAKIP OPD, (2) rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) dan (3) persentase ASN nilai SKP kategori baik.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran I

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja Sasaran	2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nil ai sakip OPD	80.85	85.61	105.89
Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	95,00	135.25	142.37
% ASN nil ai SKP kategori baik	82.00	99.49	121.33

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 9. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran I dan c apaian terhadap RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2018	2019	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap 2023 (%)
Nil ai sakip OPD	84.59	85,61	80.93	105,78
Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (eval uasi dokumen perencanaan)	79.29	135.25	95,00	142.36
% ASN nil ai SKP kategori baik	99.51	99.49	86	115.68

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran I serta alternative solusi yang telah dilakukan

INDIKATOR 1.1 NILAI SAKIP OPD

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinis Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebesar 85,61 atau mencapai target 105,89% dan naik sebesar 5,9 % dari nilai SAKIP tahun 2018. Hal ini menunjukkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menuangkan program mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD serta mampu meningkatkan pencapaian kinerja program dan kegiatan.

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 maka telah dicapai 105,78% dari target 80,93 atau telah melampaui target RPJMD.

INDIKATOR 1.2**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PEANGKAT DAERAH (EVALUASI DOKUMEN PERNECANAAN)**

Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Kelautan dan perikanan tahun 2019 sebesar 135,25 atau mencapai target sebesar 142,37% dan naik 70,6% dari capaian rata-rata kinerja tahun 2018. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kewenangan menurut UU 23 tahun 2014 seperti pengelolaan pelabuhan, pelaksanaan pengawasan laut, kegiatan konservasi serta dukungan peralatan kerja dan gedung tempat kerja oleh unit kerja baru UPT Pelabuhan sebanyak 2 unit kerja dan Kantor Cabang Dinas (KCD) sebanyak 7 unit kerja sehingga banyak target kinerja direalisasikan melebihi dari target awal perencanaan.

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 maka telah dicapai 115,69 % dari target 86 atau telah melampaui target RPJMD.

INDIKATOR 1.3**PERSEN ASN NILAI SKP KATEGORI BAIK**

Realisasi persen ASN nilai SKP kategori baik tahun 2019 sebesar 99,49 % atau mencapai target sebesar 121,33 % dan turun 0,02% dari tahun 2018 sebesar 99,51%. Hal ini disebabkan karena jumlah ASN pada tahun 2019 lebih sedikit yaitu 196 orang dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 203 orang.

ASN dengan nilai SKP kategori baik tidak mencapai 100% karena terdapat satu orang ASN indisipliner disebabkan tidak membuat SKP 2 tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 dan 2019 sebagaimana ditunjukkan tabel dibawah.



Tabel 10. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik

Tahun	Jumlah Total Pegawai (orang)	Pegawai Indisipliner (orang)	% ASN SKP kategori baik = Jumlah ASN SKP kategori baik/Jumlah Total ASN
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	203	1	99,51
2019	196	1	99.48

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 maka telah dicapai 115,69 % dari target atau telah melampaui target RPJMD.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran I

Tabel 11. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Sasaran I

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4 = (2 - 3)
Nil ai saki p OPD	105.89	90,87	32,32 (efisien)
Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (eval uasi dokumen perencanaan)	142.37		
% ASN nil ai SKP kategori baik	121.33		
Rata - Rata Capaian Kinerja	122,27		

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran I

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dapat dicapai melalui program :

❖ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.224.741.188,- dengan realisasi keuangan Rp. 7.231.206.175,- (98,47%) dengan realisasi fisik 98,60 %, Pelaksanaan program ini adalah terlayannya kebutuhan kantor (listrik, air dan internet) selama 12 bulan , terbayarnya pajak kendaraan, tersedianya Alat tulis kantor, dst...(dapat dilihat pada halaman lampiran PKK).



Gambar 1. Kegiatan dalam program pelayanan administrasi perkantoran seperti penyediaan makan-minum rapat, menghadiri rapat-rapat koordinasi

❖ **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.310.745.980,- dengan realisasi Rp. 4.995.080.423,- (94,06 %) dan fisik 99,96 %. Pelaksanaan program ini adalah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara 14 unit, perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia 22 unit, dst...(dapat dilihat pada halaman lampiran PKK)



Gambar 2. beberapa kegiatan dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur seperti pengadaan perlengkapan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

❖ **Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.691.675.600,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.528.313.325,- (95.42%) dengan realisasi fisik 97.41 %. Hasil dari pelaksanaan dari program ini adalah tersusunnya Dokumen RKA dan DPA Pokok dan Perubahan 4 dokumen, Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan 2 dokumen dst...(dapat dilihat pada halaman lampiran PKK)

❖ **Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.700.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.000.000,- (44,78%) dengan realisasi fisik 100 %. Hasil dari pelaksanaan dari program ini tersusunua administrasi kepegawaian , terlaksananya BIMTEK kepegawaian yang diikuti sebanyak 30 orang ASN.

SASARAN II : **Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi**

Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan faktor produksi diukur dengan 4 indikator yaitu : (1) produksi perikanan, (2) produksi perikanan kelompok nelayan, (3) kontribusi PDRB perikanan, (4) Cakupan bina kelompok nelayan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran II

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja Sasaran	2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Produksi Perikanan (Ton)	5.117.387,52	4.061.326	79.36
Produksi Perikanan kelompok nelayan (Ton)	80.010,21	174.620,24	218.24
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8,6	8,4	97,67
Cakupan Bina Kelompok nelayan (%)	30,18	17,52	58.05



- b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II tahun ini dengan tahun sebelumnya target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 13. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran II dan capaian terhadap RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2015	2106	2017	2018	2019	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap 2023 (%)
Produksi Perikanan (Ton)	3.786.837,2	3.941.648,8	4.262.553,5	3.568.952,6	4.061.326	7.145.295,69	56.83
Produksi Perikanan kelompok nelayan (Ton)	93.614	181.055,91	78.393,90	173.412,00	174.620,24	83.258.94	209.73
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	7.9	8.2	8.3	8.4	8.4	9.3	90,32
Cakupan Bina Kelompok nelayan (%)	30.17	63,70	25,32	16.08	17.52	44,18	39.65

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran II serta alternative solusi yang telah dilakukan

INDIKATOR 2.1 PRODUKSI PERIKANAN

Data produksi perikanan diperoleh dengan rumus :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Prod.Kab/Kota 1} + \text{Prod.Kab/Kota II} + \text{Prod.Kab/Kota III} + \dots \text{dst}$$

$$X_{\text{tot}} = X_1 + X_2 + X_3 + \dots$$

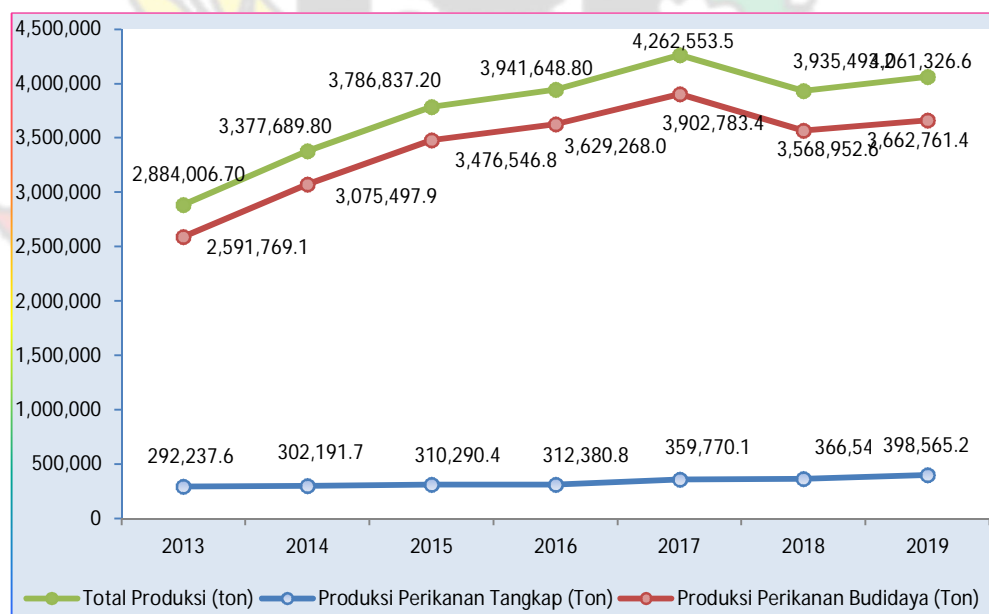
Berdasarkan tabel 12, tahun 2019 produksi perikanan hanya mencapai target sebesar 79,36%, namun bila dibandingkan dengan tahun 2018 produksi perikanan meningkat sebesar 2.7 %. Produksi perikanan selama kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi dengan peningkatan rata-rata 1,94%.

Peningkatan produksi sebagai dampak dari adanya kegiatan penyediaan sarana prasarana peningkatan kapasitas nelayan berupa bantuan ke masyarakat yaitu bantuan kapal diatas 5 GT, alat tangkap dan alat bantu tangkap untuk mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan. Sedangkan tidak tercapainya target produksi perikanan dipengaruhi penurunan produksi udang akibat hama penyakit dan musim kemarau yang panjang sehingga produksi udang kurang berhasil di beberapa kabupaten.

Upaya yang akan dilakukan adalah desiminasi inovasi teknologi budidaya udang melalui percontohan budidaya udang khususnya udang windu sebagai prioritas kepada masyarakat yang diharapkan dapat mendorong proses penyebaran dan penerapan teknologi budidaya udang untuk meningkatkan produksi sebagai komoditi ekspor yang bernilai ekonomi tinggi.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka produksi perikanan telah mencapai 56,83 % dari target, diharapkan kurun waktu 4 tahun kedepan target RPJMD akan tercapai.

Grafik 1. Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2014 – 2019



Pada grafik 1 diatas menunjukkan bahwa fluktuasi produksi perikanan dipengaruhi oleh fluktuasi produksi perikanan budidaya yaitu produksi rumput laut dimana kontribusi produksi rumput laut sekitar 83 % - 85% terhadap total produksi perikanan.

INDIKATOR 2.2 PRODUKSI PERIKANAN KELOMPOK NELAYAN

Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah provinsi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dinas KP Pemerintah kab/kota dan pemangku kepentingan dengan rumus :

$$\text{Produksi Perikanan Kelompok Nelayan} = \frac{\text{Jumlah Produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah Produksi Ikan Daerah}}$$

Tabel 14. Produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2015 - 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan (ton)	93.614	181.055,91	78.393,90	173.412,00	174.620,24
Jumlah Produksi Ikan di Daerah (ton)	310.290,4	312.380,8	359.770,1	366.540,6	436.550,6
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	28,71	55,18	20,02	47,66	40

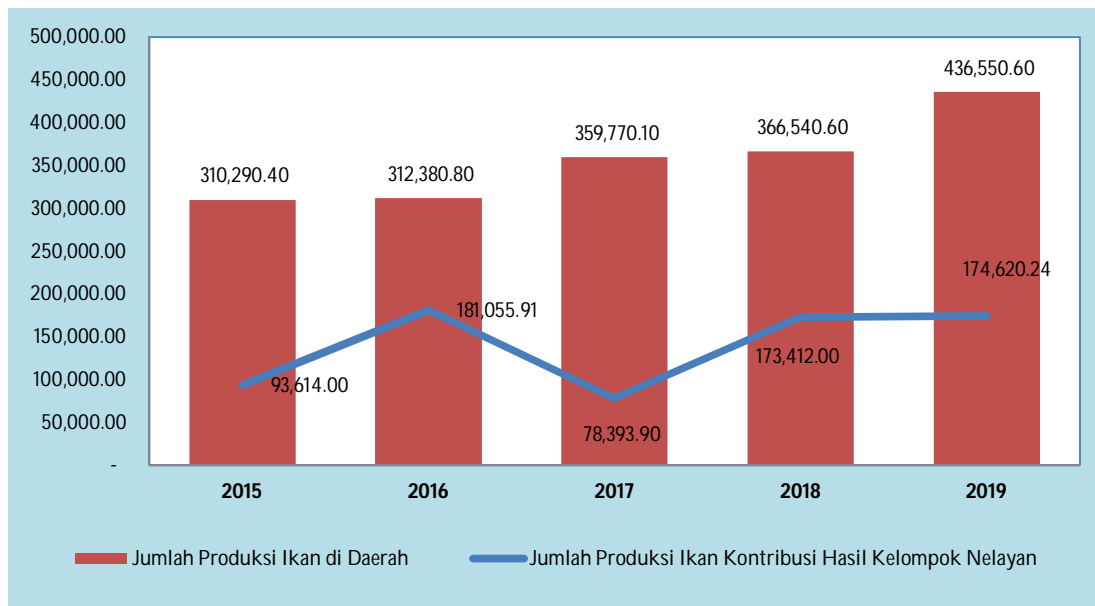
Realisasi produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2019 sebesar 174.620,24 ton atau mencaoi 218,24% dari target sebesar 80.010,21 ton. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya , produksi kelompok nelayan selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana produksi kelompok nelayan mengalami peningkatan sebesar 0,7% ton dibandingkan tahun 2018.

Tingginya capaian produksi perikanan kelompok nelayan yang mencapai 218% disebabkan data perencanaan menggunakan baseline tahun 2017 karena data tahun 2018 belum tersedia. Oleh karenanya akan dilakukan revisi target pada



dokumen perencanaan (revisi target renstra) saat perubahan RPJMD yang akan datang.

Grafik 2. Produksi perikanan kelompok nelayan dan produksi ikan daerah



Berdasarkan data grafik 1 diatas memperlihatkan kontribusi produksi nelayan berfluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2019, peningkatan kontribusi produksi yang cukup besar terjadi di tahun 2016 sebesar 55,18%, hal ini disebabkan pada tahun 2016 puncak bantuan pemerintah yang diterima oleh nelayan. Kemudian terjadi perlambatan pertumbuhan produksi kontribusi nelayan yang mendapatkan bantuan pada tahun 2017 sebesar 20,02% dan melaju tumbuh sampai tahun 2019 sebesar 40%. Oleh karena itu perlu diupayakan pembinaan kepada kelompok nelayan secara optimal dengan melakukan koordinasi dengan Penyuluh perikanan kemudian pendataan produksi kelompok nelayan dilakukan secara efektif dan berkala. Indikator ini didukung oleh program Hilirisasi Perikanan (program prioritas) dan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan melalui

kegiatan Peningkatan Kapasitas Nelayan, Koordinasi pengelolaan perikanan tangkap dan tata kelola pelabuhan perikanan, Identifikasi Dan Monitoring Penerapan LogBook Kapal Perikanan dan Data Keragaan Kapal Perikanan.

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah provinsi telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan.

Terkait dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 83.258,94 ton, maka telah dicapai 209,73 % atau telah melampaui target RPJMD.

INDIKATOR 2.3 KONTRIBUSI PDRB PERIKANAN

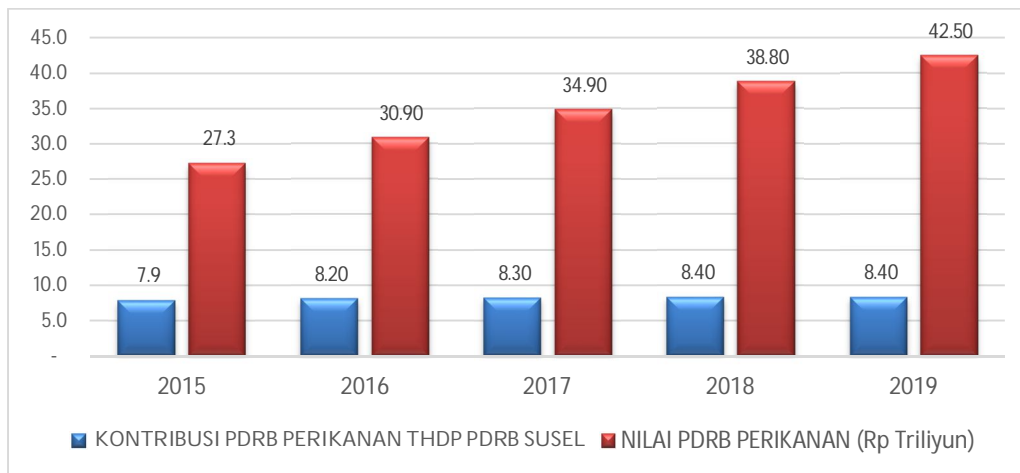
Data kontribusi PDRB perikanan diperoleh dari Data Badan Pusat Statistik. Rumus penghitungan kontribusi PDRB Perikanan adalah:

$$\text{kontribusi PDRB perikanan} = \frac{\text{Nilai PDRB sektor perikanan}}{\text{Jumlah nilai PDRB Sulawesi Selatan}} \times 100\%$$

Realisasi kontribusi PDRB sub sektor perikanan pada tahun 2019 sebesar 8,4% atau hanya mencapai target sebesar 97,67 % namun tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 8,4 %. Namun dilihat dari nilai PDRB perikanan mengalami peningkatan yaitu 38,8 Trilyun pada tahun 2018 menjadi 42,5 Trilyun pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan kontribusi PDRB perikanan disebabkan masih rendahnya kontribusi nilai tambah produksi karena mayoritas produk dijual dalam bentuk raw material. Upaya yang akan dilakukan adalah melaksanakan program hilirisasi yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan yang akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi.



Grafik 3.
Perkembangan Kontribusi PDRB Perikanan Terhadap PDRB
Sul SEL tahun 2014 -- 2019



Selama kurun waktu 5 tahun terakhir kontribusi PDRB perikanan terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 1,56%, hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang terus berupaya memperbaiki aktivitas produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Terkait dengan target akhir RPJMD, maka pada tahun 2019 telah dicapai 90,32 % dari target yang ditelaah ditetapkan pada tahun 2023.

INDIKATOR 2.4 CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN

Untuk mengukur capaian cakupan bina kelompok nelayan menggunakan formula sebagai berikut:

Cakupan bina kelompok nelayan =

$$\frac{\text{jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan Pemda tahun } N}{\text{Jumlah Kelompok Nelayan}}$$

Pada tahun 2019 realisasi cakupan bina kelompok nelayan sebesar 17,52% atau mencapai target sebesar 58,05 dan bila dibandingkan dengan tahun 2018 maka terjadi peningkatan sebesar 7,9%. Tidak tercapainya target disebabkan Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok perlu ditingkatkan.

Tabel 15. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2017 - 2019

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun-n				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda (klp)	89	193	78	50	55
Jumlah kelompok nelayan Sul Sel (klp)	295	303	358	308	314
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	30.17	63.7	21,79	16.23	17.52

Selama kurun waktu 2015 – 2019 cakupan bina kelompok nelayan berfluktuasi dan cenderung mulai menurun di tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya pembagian urusan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota yang termuat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dibawah kapal 5 GT adalah kewenangan kabupaten/Kota sehingga tahun 2017 – 2019 pembinaan nelayan fokus pada usaha nelayan skala menengah keatas (nelayan yang memiliki kapal 5 – 30 GT). Berdasarkan verifikasi dan identifikasi data kelompok nelayan bahwa jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan pendampingan dari penyuluh perikanan untuk peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok secara optimal. Keberadaan penyuluh saat ini yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 maka indikator cakupan bina kelompok nelayan telah mencapai 60,83 % sehingga diharapkan target akhir RPJMD akan tercapai,

Kelompok nelayan mendapatkan bantuan dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran II

Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Sasaran II

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
1	2	3	4 (3 -4)
Produksi Perikanan (Ton(79.36	90,87	22.46
Produksi Perikanan kelompok nelayan (Ton(218.24		
Kontribusi PDRB Perikanan (((98.83		
Cakupan Bina Kelompok nelayan (((58.05		
Rata-Rata Capaian Kinerja	113.33		

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran II

Sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi dapat dicapai melalui program :

- ❖ Program hilirisasi perikanan dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yaitu:
 - Desiminasi Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (sitto bangkit) yang dilaksanakan untuk menghasilkan inovasi teknologi budidaya udang windu (percontohan budidaya udang) sebanyak 100 unit yang tersebar di 10 kabupaten /kota yakni Kabupaten Maros, Pangkep, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Bone.



Gambar 3. Panen Perdana Kegiatan Diseminasi Percontohan Budidaya Udang Windu di Kabupaten Pinrang di hadiri oleh Bapak Gubernur Prov. Sulsel.

- Desiminasi Inovasi Teknologi Kebun Bibit Rumput Laut dilaksanakan untuk menghasilkan inovasi teknologi kebun bibit rumput laut (percontohan kebun bibit rumput laut) sebanyak 6 unit di kabupeten Bone dan Kabupaten Jeneponto.



Gambar 4. Bantuan sarana prasarana percontohan kebun rumput laut kepada kelompok pembudidaya

- Inovasi teknologi pengembangan budidaya rumput laut dilaksanakan untuk pengembangan budidaya Rumput Laut kepada para pembudidaya berupa bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut sebanyak 100 unit masing-masing di Kabupaten Wajo, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kota Makassar, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bantaeng.



Gambar 5. Bantuan sarana prasarana percontohan kebun rumput laut kepada kelompok pembudidaya

- Inovasi Teknologi Usaha Perikanan Budidaya dalam rangka Pengembangan Komoditas unggulan dan komoditas perikanan lainnya dilaksanakan untuk menghasilkan inovasi teknologi berupa pengadaan keramba jaring apung (KJA) budidaya ikan kakap putih dan baronang.



Gambar 6. Penerapan Teknologi Budidaya Kakap pada Keramba Jaring Apung

- Penyediaan dan Pembesaran Induk Unggul Berkualitas pada Budidaya payau dan laut dilaksanakan oleh UPT PBAPL untuk menghasilkan induk unggul udang windu dan udang vannamee yang berkualitas sebanyak 1.440 ekor dan nantinya akan menghasilkan benih yang berkualitas.



Gambar 7. Pengadaan induk unggul udang windu

- Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi) DAK yang dilaksanakan untuk peningkatan dan pengembangan fungsi pelabuhan perikanan diantaranya yaitu pembangunan jaringan instalasi listrik PPI Bontobahari, Pengadaan air bersih di PPI Pontap, Rehabilitasi pelataran PPI Kajang.
- Pembangunan /rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan percontohan Budidaya laut dilaksanakan untuk pembangunan sarana pokok pada UPT PBAPL diantaranya rehabilitasi bak induk, rehab bangsal, rehab saluran air dan saluran pembuangan serta pembangunan tendon untuk ketersediaan air bersih.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Garam (DAK) dilaksanakan pembangunan gudang garam yang dilengkapi dengan jembatan timbang dan conveyor di Kabupaten Jeneponto yang diharapkan dapat menampung produksi garam dari petani serta menjaga stabilitas harga garam.



Gambar 9. Gudang Garam kapasitas 1.000 ton dilengkapi Coveyor di Kab.Takalar

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan dilaksanakan untuk penyediaan sarana kapal sebanyak 29 unit, alat

tangkap 40 unit dan alat bantu tangkap sebanyak 5.540 pieces kepada nelayan.



Gambar 10. Penyerahan kapal kelompok nelayan tani Bulukamase Kab. Sinjai

- Layanan Pengujian Laboratorium Dalam Rangka Pemenuhan Standart Mutu produk dan Pemasaran yang dilaksanakan oleh UPT BPMPP telah melakukan hasil uji Sampel pengujian mutu sebanyak 70 sampel untuk meningkatkan standar mutu produk dan pemasarann produk hasil perikanan.



Gambar 11. Layanan pengujiann dalam rangka monitoring penggunaan formalin dan bahan kimia berbahaya



Gambar 12. Layanan pengujian sampel di Laboratorium UPT BPMPP

- ❖ Program peningkatan produksi kelautan dan perikanan
 - Penyusunan Standarisasi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Kewenangan Provinsi dihasilkan dokumen standarisasi fasilitas Pelabuhan Perikanan Kewenangan provinsi sebagai bahan pertimbangan pengembangan fasilitas pelabuhan selanjutnya.
 - Pemantauan Penerapan CPIB dan pembinaan UPR serta panti benih dengan unit usaha perbenihan yang melakukan penerapan CPIB sebanyak 15 unit
 - Verifikasi data dukung Rekomendasi Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan wilayah 2 hasilnya berupa Laporan verifikasi data dukung untuk pelayanan rekomendasi teknis di pelabuhan perikanan masing-masing sebanyak 4 laporan
 - Penyediaan dan pembesaran Induk Unggul Ikan Air Tawar beserta pakan (Instalasi Lajoa) dengan jumlah induk yang dibesarkan sebanyak 200.000 ekor.
 - Pembinaan Teknis Operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan wilayah 2 dengan jumlah pengelola pelabuhan perikanan yang mendapatkan pembinaan

teknis operasional pelabuhan dan kesyahbadaran pelabuhan perikanan sebanyak 12 orang.

- Pembinaan Teknis Tata Kelola dan Layanan Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan wilayah 2 dimana jumlah pengelola pelabuhan perikanan yang mendapatkan pembinaan teknis masing-masing 2 orang dan 3 orang
- Identifikasi dan Monitoring Penerapan Longbook Kapal Perikanan dan Data hasilnya adalah tersedianya laporan monitoring penerapan logbook perikanan dan data keragaan kapal perikanan sebanyak 4 laporan

f. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- ❖ Realisasi bantuan ke masyarakat tidak tersalurkan karena calon penerima bantuan tidak melengkapi syarat administrasi kelompok.
- ❖ Menurunnya daya dukung lahan budidaya untuk mendukung produktivitas.
- ❖ Produksi perikanan mayoritas dijual dan di ekspor masih dalam bentuk bahan mentah (raw material)

Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah :

- ❖ Melibatkan penyuluh dalam pembinaan kelompok dimana kelompok harus minimal dibina selama 6 bulan untuk memastikan kesiapan kelompok.
- ❖ Upaya diseminasi inovasi teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak mendukung.
- ❖ Nilai tambah produk diupayakan melalui pembinaan pelaku usaha melalui produk-produk yang memiliki nilai daya saing dan upaya mempromosikan produk olahan perikanan

SASARAN III: Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan diukur dengan 2 indikator yaitu : (1) konsumsi ikan (2) kontribusi ekspor perikanan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran III

Tabel 17. Capaian Kinerja indikator sasaran III Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran	2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	53,6	64,70	120,71
Kontribusi ekspor perikanan (%)	5,63	8,08	143,55

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III tahun ini dengan tahun sebelumnya target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 18. Perkembangan Capaian Kinerja indikator sasaran III dan Capaian terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2017	2018	2019	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap 2023 (%)
Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	55,2	56,3	57,40	61,72	100,62

Kontribusi ekspor perikanan (%)	10,30	6,28	8,08	6.85	117,9
---------------------------------	-------	------	------	------	-------

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran I serta alternative solusi yang telah dilakukan

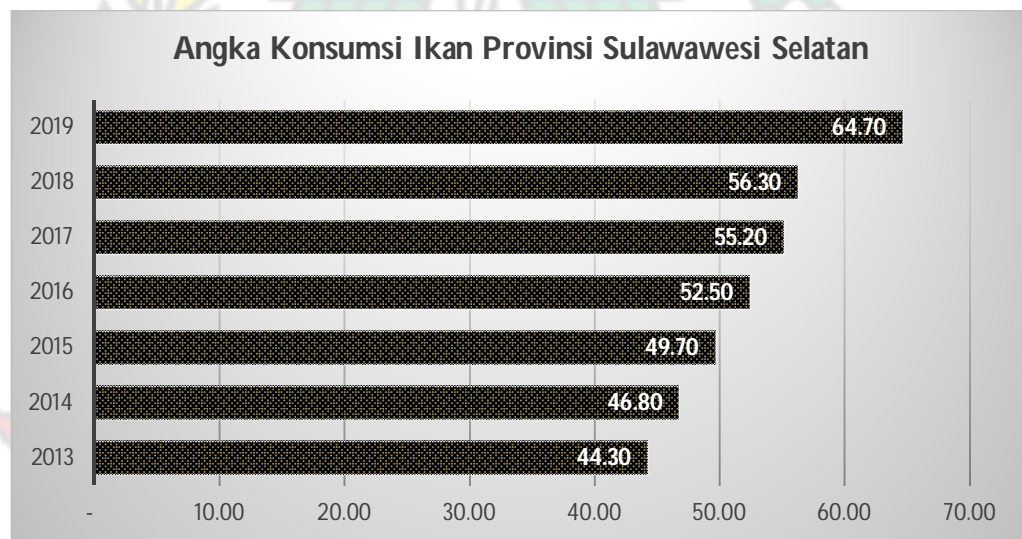
INDIKATOR 3.1 KONSUMSI IKAN

Cara untuk mengukur capaian konsumsi ikan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{(\text{total produksi} - \text{produksi bukan bahan makanan}) - \text{ekspor} - 15\%}{(\text{jumlah penduduk pertengahan tahun} / 2)}$$

Keterangan : 15% adalah data produkdiantarpulau yang takterhitung (range 0 – 15 %)

Grafik 4.
Perkembangan Konsumsi Ikan Prov. Sul SEL tahun 2014 -- 2019



Berdasarkan grafik diatas terlihat angka konsumsi ikan pada tahun 2019 sebesar 64,70 kg/kap/th atau mencapai 120,71 % dari target 53,6kg/kap/thn. Capaian ini naik 14,9 % dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 56,3kg/kap/tahun. Begitupun halnya dengan trend angka konsumsi ikan selama tahun 2013 – 2019 terus mengalami kenaikan. Hal ini dimungkinkan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang

mengonsumsi ikan cukup tinggi dan memiliki budaya makan ikan yang tinggi serta pencapaian dari perikanan tangkap dan budidaya yang cukup mendukung. Selain faktor budaya, pencapaian konsumsi ikan ini tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan berupa keikutsertaan pada pameran produk perikanan, penyebaran informasi melalui promosi dan pameran, lomba masak serba ikan, dan Pengembangan sarana dan prasarana hasil perikanan.

Terkait dengan target capaian RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023, maka pada tahun 2019 sudah mencapai 100,62 % dari target 64,30 %.

Gambar 13. Promosi Gemar Makan Ikan (GEMARI)





Gambar 14. Keikutsertaan lomba masak dan pameran untuk promosi produk olahan perikanan

INDIKATOR 3.2 KONTRIBUSI EKSPOR PERIKANAN

Data kontribusi ekspor perikanan diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Ekspor Perikanan} = \frac{\text{Jumlah ekspor hasil perikanan}}{\text{Total ekspor daerah}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2019 realisasi kontribusi ekspor perikanan sebesar 8,08 % atau mencapai 143,55 % dari target 5,63%. Capaian ini naik 28,8% dari tahun 2018 dimana kontribusi ekspor perikanan hanya sebesar 6,26%

Tabel 19. Realisasi Ekspor Tahun 2017 - 2019

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun-n		
	2017	2018	2019
Ekspor perikanan (Ton)	126.244,3	130.623,1	166.373,2
Nilai Ekspor Perikanan US \$ (1000)	251.777,9	340.390,4	355.301,7
Ekspor sulsel (Ton)	1.225.295,2	2.081.510	2.058.580
Nilai Ekspor Sulsel US \$	1.020.800.000	1.164.350.000	1.213.620.000
Kontribusi ekspor perikanan (%)	10,30	6,28	8,08

Jika dilihat dari kurun waktu 2017 – 2019 maka kontribusi perikanan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya ekspor rumput laut dimana tahun 2017 sebesar 102.121 ton, menjadi 105.760 pada tahun 2018, kemudian meningkat signifikan sebesar 32,8 % pada tahun 2019 yaitu 140.420,1 ton.

Terkait dengan target RPMJD yang akan dicapai pada tahun 2023 yaitu sebesar 6,85%, maka pada tahun 2019 sudah mencapai 117,98 % atau telah mencapai target RPJMD.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran III;

Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Sasaran III

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4 = 2 - 3)
Konsumsi (kg/kap/tahun (107,09	98,37	26.95
Kontribusi ekspor perikanan ((143,55		
Rata-rata capaian kinerja	125,32		

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran III

Sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan tersebut dapat dicapai melalui program sebagai berikut :

- ❖ Program penerapan mutu, pengembangan usaha dan daya saing, dengan kegiatan pendukung diantaranya :
 - Penanganan Mutu di Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan wilayah 2 yang dilaksanakan oleh UPT BPMPP dengan jumlah pembinaan pelaku usaha yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik masing-masing 30 orang.



Gambar 15. Penanganan mutu di pelabuhan wilayah I



Gambar 16. Penanganan mutu dipelabuhan wilayah 2

- Perlindungan dan fasilitasi akses usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan , hasilnya adalah jumlah usaha pengolah dan pemasar yang terdata dan terfasilitasi perlindungan dan akses usaha modal sebanyak 629 orang
- Verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha pengolahan dan pemasar dimana jumlah laporan verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha pengolahan dan pemasar sebanyak 100 laporan.

f. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- ❖ Pemasaran produk UKM masih skala kecil dan lingkup lokal.
- ❖ Kemasan produk masih sederhana dan masih terdapat produk yang belum mendapatkan sertifikasi halal dan BPOM

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- ❖ Mengikutsertakan UKM dalam berbagai event lokal dan nasional sebagai sarana promosi produk.
- ❖ Pembinaan kepada UKM untuk pemenuhan standarisasi sertifikasi halal dan BPOM

SASARAN IV: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan diukur dengan 1 indikator yaitu : (1) Nilai Tukar Nelayan (NTN).

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran IV

Tabel 21. Capaian Kinerja Sasaran IV Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran	2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Tukar Nelayan	107.79	107.60	99.82

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV tahun ini dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 22. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran IV dan Capaian terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2015	2016	2017	2018	2019	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap 2023 (%)
Nilai Tukar Nelayan	107,14	103,5	107,6	107,8	107.60	108.22	99.4



c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran I serta alternative solusi yang telah dilakukan**

INDIKATOR 4.I NILAI TUKAR NELAYAN

Realisasi NTN tahun 2019 adalah 107,6 atau mencapai 99,82% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 nilai tukar nelayan mengalami penurunan sebesar 0,3% hal ini dipengaruhi indeks harga yang diterima nelayan lebih besar dari indeks harga yang dibayar atau dikeluarkan oleh nelayan. Adapun indeks tersebut sangat dipengaruhi pola konsumsi nelayan terhadap kebutuhan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan BBM untuk operasional melaut. Nilai tukar nelayan lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik.

Grafik 3. Data Perkembangan NTN tahun 2014 – 2019



Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD tahun 2023 sebesar 108,22 maka telah dicapai 99,4% dari target sehingga diharapkan target akhir RPJMD dapat tercapai,

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran IV

Tabel 23. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Sasaran IV

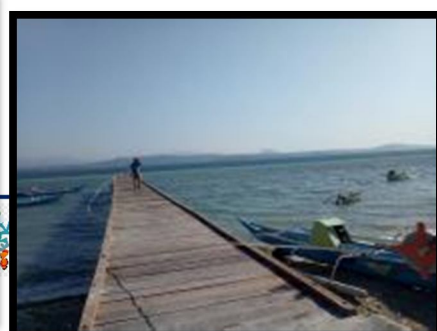
Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
1	2	3	4 = (2 - 3)
Nilai Tukar Nelayan (%)	99,82	97.63	2,19

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran IV).

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat dicapai melalui program sebagai berikut :

- ❖ Program pengawasan , konservasi , penataan dan rehabilitasi pesisir dan Laut melalui kegiatan:
 - Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil & Prasarana di Pulau-Pulau Kecil (DAK) hasilnya berupa terbangunnya tambatan perahu di pulau-pulau kecil yaitu : (1) Pulau Pasigusung Desa Bontolebang, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar, (2) Pulau Libukang Desa Bonto Rannu Kecamatan Bangkala Kab. Jeneponto.



Gambar 17. Pembangunan tambatan perahu Pulau Pasigusung Desa Bontolebang, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar (kiri) dan tambatan perahu di Pulau Libukang Desa Bonto Rannu Kecamatan Bangkala Kab. Jeneponto (kanan)

- Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil di yang dilaksanakan oleh 7 Cabang Dinas Kelautan (CDK) dimana kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir serta mensosialisasikan kepada masyarakat pesisir untuk menjaga pantai atau dengan slogan “pantai berseri” masing-masing sebanyak 60 orang. Selain itu melalui kegiatan ini terbangunnya 2 unit tambatan perahu di daerah pesisir Kabupaten Luwu yaitu di Desa Batu lotong Kec. Larompong dan Desa Basiang Timur Ponrang Selatan.



Gambar 18. Pembangunan tambatan perahu di Kabupaten Luwu yaitu di Desa Batu lotong Kec. Larompong (kiri) dan Desa Basiang Timur Ponrang Selatan (kanan)

f. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- ❖ Untuk penyediaan infrastruktur di Pulau-Pulau kecil masih kurangnya data/ belum terkoordinasinya database pulau-pulau kecil berupa potensi, karakteristik, peluang usaha, permasalahan yang dapat menjadi bahan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan/penyediaan infrastruktur di Pulau-Pulau kecil.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- ❖ Melakukan penyusunan basis data (database) bekerjasama dengan kabupaten/kota menginventarisir dan mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

SASARAN V: Meningkatnya Kelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kelautan dan Perikanan



Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan diukur dengan 2 indikator yaitu : (1) rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial, (2) proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran V

Tabel 24.. Capaian indikator Kinerja Sasaran V

Indikator Kinerja Sasaran	2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (((0.26	1.01	388.46
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (((48.85	58.69	119.05

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I tahun ini dengan tahun sebelumnya target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 25. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran V dan Capaian terhadap RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2015	2016	2017	2018	2019	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap 2023 (%)
Rasio Kawasan	0.22		0.22	1.01		0.34	

Lindung perairan terhadap total luas perairan territorial ((0,22			1,01		297,06
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman ((41,7	42,0	48,4	48,92	53,59	55,10	97,26

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran V serta alternative solusi yang telah dilakukan

INDIKATOR 5.1	RASIO KAWASAN LINDUNG PERAIRAN TERHADAP TOTAL LUAS PERAIRAN TERRITORIAL
---------------	---

Pada tahun 2019 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial adalah 0,26% dapat direalisasikan sebesar 1,01 % atau mencapai target sebesar 388,46%. Pencapaian luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan meningkat drastis disebabkan penetapan teluk Bone sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan hal ini sebagai respon akan pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi dimana yang dulu masing-masing kabupaten/kota mengelola sendiri kawasan konservasi perairan daerah diwilayahnya masing-masing yang sekarang diserahkan ke Provinsi sebagaimana diatur pada UU 23 tahun 2014. Total pengelolaan luas kawasan konservasi dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 seluas 341.017.8 Ha hampir 50% dari luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dikelola.

Tabel 26. Realisasi kawasan lindung perairan Tahun 2015 - 2019

Bidang/Urusan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kawasan lindung perairan (Ha)	92,557.1	95,241.0	95,752.10	433,551,94	433,574,94

Total Luas perairan territorial (Ha)	43,047,900.0	43,047,900.0	43,047,900.0	43.047.900	43.047.900
Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	0.22	0.22	0.22	1,01	1,01

Luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 674.119,88 Ha, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2018-2023 luas kawasan akan ditargetkan seluas 1,038.859,36 Ha dengan penambahan sebesar 97.648,48 Ha. Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ekosistem dan habitat laut maka pada tahun 2015 kawasan konservasi yang dikelola sebesar 92.557,0 Ha kemudian tahun 2016 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalam UU 23/2014 sehingga pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah bertambah 95.241,1 Ha atau seluas 769.360,98 dan tahun 2017 pengelolaan kawasan konservasi bertambah sebesar 95.752,1 Ha sehingga luas kawasan konservasi mencapai 769.871,98, kemudian pada tahun 2018 luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 433.551,94 Ha atau mencapai 353,3 % dari target 122.728 Ha dan tahun 2019 meningkat menjadi 433.574,94 Ha.

Jika dibandingkan dengan target akhir akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 0,34 maka telah dicapai 297,06% atau telah melampaui target akhir RPJMD.

INDIKATOR 5.2 PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN

Pada tahun 2019 realisasi proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah 53,59% atau mencapai 109,14% dari target 49,10 dan mengalami kenaikan sebesar 19,5% dari tahun 2018. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan

untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk provinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk provinsi sebesar 743.800 ton. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan sehingga batasan biologis berada pada kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan < 100%. Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

Tabel 27. Realisasi Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Tahun 2015 - 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Tangkapan Ikan (Ton)	310.290,4	312.380,8	359.770,1	363.853,0	398.565,2
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari (Ton)	743.776	743.776	743.776	743.776,0	743.776,0
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	41,7	42,0	48,4	48,92	53,59

Dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman. Tahun 2015, proporsi tangkapan ikan sebesar 41,7% dan sampai tahun 2018 mencapai 48,92%.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka telah dicapai 97,26 % sehingga diharapkan target RPJMD dapat tercapai.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran V;

Tabel 28. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Sasaran V

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
1	2	3	4 (2-3)
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (((388.46	96,27	157,73
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (((119.05		
Rata-Rata Capaian Kinerja	254,0		

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran I).

Sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan SDKP melalui program sebagai berikut :

- ❖ Program pengawasan , konservasi , penataan dan rehabilitasi pesisir dan Laut melalui kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dan Perikanan (DAK) berupa pengadaan perahu pokmasawas 2 unit dan pengadaan speedboat pengawasan 2 unit.
- Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan di 7 CDK dengan hasil kegiatan total luasan rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melakukan penanaman mangrove seluas 23,2 Ha
- Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan dengan total jumlah patroli 52 kali
- Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan dengan pokmasawas yang diberdayakan masing-masing 10 kelompok.
- Pengawasan terpadu SDKP yang dilaksanakn sebanyak 4 kali patroli.
- Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan yang dilaksanakan oleh 7 Cabang Dinas Kelautan. kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan pemanfaatan SDKP secara berkelanjutan.



Gambar 19. Penanaman mangrove untuk merehabilitasi ekosistem mangrove

- Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan yang dilaksanakan oleh 7 Cabang Dinas Kelautan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Patroli pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan di 7 wilayah kerja CDK telah melaksanakan patroli sebanyak 7 kali pengawasan dengan pencapaian realisasi fisik 100%



Gambar 20. Patroli Pengawasan IUU Fishing & Pemantauan Kapal Perikanan

- Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh 7 Cabang Dinas Kelautan



Gambar 21. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pokmaswas

- Pengawasan terpaduk SDKP yang dilaksanakan oleh Bidang PSDKP melibatkan POLAIRUD dan PPNS .



Gambar 22. Pelaksanaan patrol terpadu yang melibatkan aparat POLAIRUD dan PPNS

Faktor pendukung keberhasilan

- ❖ Dukungan anggaran DAK untuk penyediaan sarana prasarana pengawasan dan konservasi seperti pengadaan speedboat pengawas , kapal pengawas, perlengkapan pengawasan.
- ❖ Kelembagaan/kelompok masyarakat pengawas yang terus meningkat di Kabupaten/kota

Hambatan/masalah yang dihadapi

- ❖ Masih maraknya penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive*) seperti penggunaan bom, bus dan alat tangkap yang dilarang.
- ❖ Alih fungsi lahan pesisir yang merusak ekosistem mangrove , lamun dan terumbu karang.

Solusi

- ❖ Pengutan peran POKMASWAS yang melibatkan masyarakat setempat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan dan biota laut.
- ❖ Menyusun regulasi pengelolaan kawasan konservasi dan penataan ruang laut, pesisir dan PPK untuk kemudian disosialisasikan ke masyarakat.

3.3. REALISASI ANGGARAN



Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan pada tahun 2019 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2,460,425,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2,332,664,000,- (94,81 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 29. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,067,425,000	1,135,262,500	106.36
2.	Retribusi Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Prov. Sul - sel	1.000.000.000,-	825,140,000	82.51
3.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	393.000.000	371,851,000	94.62
	Total	2,460,425,000	2,332,664,000	94.81

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian intern Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di dalam pelaksanaan anggaran tersebut dilaksanakan melalui rapat monitoring yang dilakukan setiap minggu pertama setiap bulannya dan monitoring secara langsung di lapangan dengan peninjauan langsung kelokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan.

b. Belanja

Untuk tahun 2019 ini, total alokasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 75,508,118,674.9,- dan total realisasi sebesar Rp 72,656,900,395 ,- (96.22 %), dan realisasi fisik 98.59 % yang terdiri dari:

1) *Belanja Tidak Langsung*

Total alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp 24,236,860,000.00 ,- dengan realisasi Rp 24,201,081,332 ,- (99,85%), dan realisasi fisik 100 %.

2) *Belanja Langsung*

Alokasi anggaran untuk belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp 51,271,258,674.99 ,- dengan realisasi Rp 48,455,819,063 ,- (94,51%), dan realisasi fisik 97,99 %.

Gambaran anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan yang bersumber pada anggaran APBD TA. 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2019

SUMBER ANGGARAN APBD	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		KEUANGAN (Rp)	(%)	FISIK (%)
Bel anj a Tidak Langsung	24,236,860,000.00	24,201,081,332	99,85	100
Bel anj a Langsung	51,271,258,674.99	48,455,819,063	94,51	97,99
T o t a l	75,508,118,674.9	72,656,900,395	96.22	98.59

Adapun realisasi keuangan dan fisik berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 31. Realisasi keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan TA. 2019

NO.	PROGRAM RENSTRA PROV/KEGIATAN INSTANSI	REALISASI BELANJA
-----	--	-------------------



		ANGGARAN	KEUANGAN		FISIK (%)
			(Rp.)	%	
A.	BELANJA LANGSUNG	51,271,258,674.99	48,455,819,063	94.51	97.99
I	HILIRISASI PERIKANAN (PRIORITAS)	25,116,905,106.99	24,212,459,551	96.40	97.91
1	Desiminasi Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (Sitto Bangkit)	3,814,500,000	3,789,357,188	99.34	99.56
2	Desiminasi Inovasi Teknologi Kebun Bibit Rumput Laut	370,000,000	336,698,400	91.00	100
3	Inovasi Teknologi Pengembangan Budidaya Rumput Laut	1,330,000,000	1,221,590,010	91.85	97.75
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>	<i>1,106,000,000</i>			<i>97.29</i>
4	Pengendalian Penggunaan Pakan dan Obat-obatan	30,000,000	28,290,000	94.30	94.30
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>				
5	Inovasi Teknologi Usaha Perikanan Budidaya dalam rangka Pengembangan Komoditis Unggulan dan Komoditas Perikanan Lainnya	238,100,000	223,100,000	93.70	100
	<i>UPTD PPBL (Bojo)</i>				
6	Penyediaan dan Pembesaran Induk Unggul Berkualitas pada Budidaya Payau dan Laut	130,569,000	130,294,000	99.79	100
	<i>UPTD PPBL (Bojo)</i>				
7	Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Analisis Manajemen Resiko Usaha Budidaya	60,000,000	58,040,000	96.73	100
	<i>UPTD PPBL (Bojo)</i>				
8	Inovasi Teknologi Pengembangan Usaha Garam	219,250,000	124,387,900	56.73	56.73
	<i>Bidang Pesisir dan PRL</i>				
9	Pengelolaan Saluran Tambak Garam	410,000,000	398,962,000	97.31	97.56
	<i>Bidang Pesisir dan PRL</i>				
10	Pembinaan Teknis Penanganan Hasil Tangkapan Ikan di Atas Kapal	83,380,000	82,979,050	99.52	100
	<i>Bidang perikanan tangkap</i>				
11	Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi) DAK	1,502,400,000	1,336,411,000	88.95	100
	<i>UPT Pelabuhan Wilayah 1</i>	<i>149,800,000</i>			<i>100</i>
	<i>UPT Pelabuhan Wilayah 2</i>	<i>1,352,600,000</i>			<i>100</i>
12	Pembinaan Teknis Usaha Perikanan Budidaya dalam rangka Pengembangan Komoditis Unggulan (Perencanaan Bisnis, Perbaikan Pencatatan Produksi dan Penataan Operasional Kelompok)	769,270,100	631,097,160	82.04	82.04
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>				
13	Sertifikat Usaha Perikanan Budidaya	95,600,000	67,605,200	70.72	75.37
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>				
14	Pembangunan /rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan percontohan Budidaya Laut (DAK)	2,127,998,006.99	2,125,280,695	99.87	100
	<i>UPTD PPBL (Bojo)</i>				
15	Pemberdayaan Kelompok Usaha Garam	70,000,000	25,717,500	36.74	50.00
	<i>Bidang Pesisir dan PRL</i>				
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Garam (DAK)	1,345,650,000	1,345,055,000	99.96	100.00
	<i>Bidang Pesisir dan PRL</i>				
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan	9,031,970,000	8,873,516,802	98.25	98.25
	<i>Bidang perikanan tangkap</i>				
18	Penyediaan sarana dan prasarana Pemasaran Ikan Higienis dan distribusi Ikan di Pelabuhan Perikanan Wilayah 1	156,000,000	154,832,000	99.25	100
	<i>UPT Pelabuhan Wilayah 1</i>				
19	Inovasi Sistem Olahan Rumput Laut	41,900,000	41,642,035	99.38	100
	<i>UPT BPMPP</i>				
20	Penguatan Pola Kemitraan dan Promosi Produk	128,370,000	124,437,560	96.94	100
	<i>UPT BPMPP</i>				
21	Inovasi Pengolahan Garam Bahan Baku Industri, Bahan baku Farmasi dan Garam Konsumsi	43,800,000	43,794,987	99.99	100
	<i>UPT BPMPP</i>				
22	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan Higienis dan Distribusi Ikan di Pelabuhan Perikanan Wilayah 2	550,000,000	519,093,050	94.38	100
	<i>UPT Pelabuhan Wilayah 2</i>				
23	Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan Konsumsi	521,500,000	518,377,185	99.40	100

	dan Non Konsumsi				
	UPT BPMPP				
24	Pembinaan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, produktif dan Kompetitif serta sertifikasi Kelayakan Pengolah	266,425,000	265,621,600	99.70	100
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>				
25	Layanan Pengujian Laboratorium Dalam Rangka Pemenuhan Standart Mutu produk dan Pemasaran	1,500,000,000	1,483,555,329	98.90	100
	UPT BPMPP				
26	Pengolahan Kemitraan Dalam Rangka Pemenuhan Standart Mutu Produk dan Pemasaran	85,525,000	85,325,000	99.77	100
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>				
27	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Kerjasama Tata Nlaga Pemasaran	48,600,000	31,876,400	65.59	65.59
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>				
28	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan	146,098,000	145,522,500	99.61	100
	<i>Bidang Pengawasan SDKP</i>				
II	PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,547,235,000	1,333,764,395	86.20	88.75
29	Penyusunan Standarisasi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Kewenangan Provinsi	312,450,000	310,178,785	99.27	100
	<i>Bidang perikanan tangkap</i>				
30	Pemantauan Penerapan CPIB dan Pembinaan UPR Serta Panti Benih	42,000,000	28,309,400	67.40	67.40
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>				
31	Verifikasi Data Dukung Rekomendasi Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah 1	26,000,000	25,990,100	99.96	100
	<i>Bidang perikanan tangkap</i>				
32	Verifikasi Data Dukung Rekomendasi Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah 2	48,600,000	48,491,400	99.78	100.00
	<i>Bidang perikanan tangkap</i>				
33	Penyediaan dan Pembesaran Induk Unggul Ikan Air Tawar Beserta Pakan (Instalasi Lajoa)	494,100,000	380,175,000	76.94	80.79
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>				
34	Pembinaan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Wilayah 2	93,750,000	83,631,000	89.21	89.21
	UPT Pelabuhan Wilayah 2				
35	Koordinasi Teknis Pengelolaan Perikanan Budidaya (penerapan Dan Survelen CBIB)	77,660,000	47,061,000	60.60	66.65
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>				
36	Koordinasi Teknis Pengelolaan Perikanan Tangkap	36,275,000	36,220,000	99.85	100
	<i>Bidang perikanan tangkap</i>				
37	Pembinaan Teknis Tata Kelola dan Layanan Pelabuhan Perikanan Wilayah 1	82,850,000	82,286,000	99.32	100
	UPT Pelabuhan Wilayah 1				
38	Pembinaan Teknis Tata Kelola dan Layanan Pelabuhan Perikanan Wilayah 2	93,950,000	93,888,050	99.93	100
	UPT Pelabuhan Wilayah 2				
39	Verifikasi Data Dukung Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	30,000,000	29,970,000	99.90	100.0
	<i>Bidang perikanan tangkap</i>				
40	Koordinasi Teknis Tata Kelola Pelabuhan Perikanan	14,350,000	14,245,000	99.27	100
	<i>Bidang perikanan tangkap</i>				
41	Perlindungan dan Fasilitas Akses Usaha Pembudidayaan	104,000,000	63,123,360	60.70	71.68
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>				
42	Identifikasi dan Monitoring Penerapan Longbook Kapal Perikanan dan Data Keragaan kapal Perikanan	51,250,000	50,740,000	99.00	100
	<i>Bidang perikanan tangkap</i>				
14					
43	Perlindungan Dana Fasilitas Akses Usaha Nelayan	40,000,000	39,455,300	98.64	100
	<i>Bidang perikanan tangkap</i>				
III	PENERAPAN MUTU PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	249,060,000	244,990,317	98.37	100



50	Penanganan Mutu di Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 <i>UPT BPMPP</i>	92,800,000	91,293,993	98.38	100
51	Penanganan Mutu di Pelabuhan Perikanan Wilayah 2 <i>UPT BPMPP</i>	76,600,000	76,519,450	99.89	100
52	Perlindungan dan Fasilitasi Akses Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan <i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>	49,660,000	49,151,874	98.98	100
53	Verifikasi Data Dukung Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran <i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>	30,000,000	28,025,000	93.42	100
IV	PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	9,214,195,800	8,907,004,877	96.67	98.29
61	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK) <i>CDK Pangkajene</i> <i>CDK Maminasata</i>	566,000,000 366,000,000 200,000,000	564,778,900	99.78	100 100 100
62	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil & Prasarana di Pulau-Pulau Kecil (DAK) <i>CDK Luwu Raya</i> <i>CDK Kep. Selayar</i> <i>CDK Wilayah Selatan</i> <i>CDK Pangkajene</i> <i>CDK Bosowasi</i>	1,214,435,000 69,900,000 255,700,000 215,670,000 623,165,000 50,000,000	1,206,060,200	99.31	100 100 100 100 100
63	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kepulauan Selayar <i>KCD Selayar</i>	100,000,000	93,998,000	94.00	100
64	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Maminasata <i>KCD Maminasata</i>	148,581,500	148,308,630	99.82	100
65	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Pangkep <i>KCD Pangkep</i>	271,000,000	270,160,000	99.69	100
66	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Ajatappareng <i>KCD Ajatappareng</i>	131,145,000	131,090,000	99.96	100
67	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Bosowasi <i>KCD Bosowasi</i>	207,500,000	206,930,000	99.73	100
68	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Luwu Raya <i>KCD Luwu Raya</i>	400,000,000	395,505,000	98.88	98.97
69	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K Provinsi Sulawesi Selatan <i>Bidang pesisir dan PRL</i>	146,640,000	124,190,900	84.69	84.69
70	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Penataan Ruang Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil <i>Bidang pesisir dan PRL</i>	174,350,000	132,068,700	75.75	78.05
71	Pelestarian Biota Laut yang dilindungi <i>Bidang pesisir dan PRL</i>	63,760,000	7,890,000	12.37	12.37
72	Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Maminasata <i>KCD Maminasata</i>	580,000,000	579,527,700	99.92	100
73	Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Selatan <i>KCD Wilayah Selatan</i>	255,300,000	253,300,000	99.22	100
74	Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Kepulauan Selayar <i>KCD Kepulauan Selayar</i>	105,000,000	103,422,000	98.50	100
75	Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Pangkep <i>KCD Kepulauan Pangkep</i>	285,000,000	282,855,000	99.25	100
76	Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan	276,280,000	271,121,798	98.13	100

	Wilayah Ajatappareng				
	KCD Kepulauan Ajatappareng				
77	Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan	335,000,000	333,060,000	99.42	100
	Wilayah Bosowasi				
	KCD Bosowasi				
78	Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan	245,000,000	242,055,000	98.80	100
	Wilayah Luwu Raya				
	KCD Luwu Raya				
79	Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	223,679,900	215,334,440	96.27	100
	Wilayah Maminasata				
	KCD Maminasata				
80	Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	195,000,000	194,495,000	99.74	100
	Wilayah Selatan				
	KCD Wilayah Selatan				
81	Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	373,360,000	365,116,000	97.79	100
	Wilayah Kepulauan Selayar				
	KCD Kepulauan selayar				
82	Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	583,600,000	576,719,414	98.82	100
	Wilayah Pangkajene Kepulauan				
	KCD Pangkep				
83	Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	177,620,000	175,790,000	98.97	100
	Wilayah Ajatappareng				
	KCD Ajatappareng				
84	Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	410,885,000	387,935,250	94.41	100
	Wilayah Bosowasi				
	KCD Bosowasi				
85	Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	200,005,000	189,234,900	94.62	96.91
	Wilayah Luwu Raya				
	KCD Luwu Raya				
86	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Mamminasata	617,581,500	617,193,390	99.94	100
	KCD Maminasata				
87	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	168,963,000	168,083,000	99.48	100
	KCD Wilayah Selatan				
88	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bosowasi	68,000,000	65,834,000	96.81	100
	KCD Bosowasi				
89	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Luwu Raya	48,000,000	47,340,000	98.63	100
	KCD Luwu Raya				
90	Pengawasan Terpadu SDKP	186,060,000	137,745,000	74.03	93.04
	Bidang Pengawasan SDKP				
91	Penyadaran Tindakan Destruktif Fishing Kepada Nelayan	81,100,000	74,089,460	91.36	100
	Bidang Pengawasan SDKP				
92	Koordinasi Teknis Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,850,000	26,636,000	56.85	62.66
	Bidang pesisir dan PRL				
93	Koordinasi Teknis Pengawasan dan Pengendalian SDKP	62,899,900	62,790,200	99.83	100.00
	Bidang Pengawasan SDKP				
94	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pangkep	232,000,000	223,697,335	96.42	100
	KCD Pangkep				
95	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Ajatappareng	33,600,000	32,649,660	97.17	99.40
	KCD Ajatappareng				
V	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8,224,741,188	7,231,206,175	87.92	98.47
97	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	975,000,000	669,614,095	68.68	100



	Sekretaris				
98	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	96,000,000	40,364,794	42.05	100
	Sekretaris				
99	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	3,148,800,000	2,991,450,000	95.00	100
	Sekretaris	2,743,200,000			100
	UPTD PPMHP (Lab)	62,400,000			100
	CDK Luwu Raya	31,200,000			100
	CDK Wilayah Selatan	31,200,000			100
	CDK Pangkep	31,200,000			100
	CDK Maminasata	31,200,000			100
	CDK Bosowasi	31,200,000			100
	UPTD Pelabuhan WII I	62,400,000			100
	CDK Ajatappareng	31,200,000			100
	UPTD Pelabuhan WII II	62,400,000			100
	UPTD PPBL (Bojo)	31,200,000			100
100	Penyediaan Alat Tulis , Barang Cetak dan Penggandaan	1,093,303,188	915,789,050	83.76	99.92
	Sekretaris	680,457,018			99.87
	UPTD Pelabuhan WII I	20,121,800			100
	UPTD Pelabuhan WII II	22,743,600			100
	UPTD PPMHP (Lab)	95,863,120			100
	UPTD PPBL (Bojo)	13,602,000			100
	CDK Maminasata	42,837,000			100
	CDK Pangkep	67,730,800			100
	CDK Wilayah Selatan	57,103,150			100
	CDK Ajatappareng	24,798,700			100
	CDK Luwu Raya	15,000,000			100
	CDK Bosowasi	15,000,000			100
	CDK Selayar	38,046,000			100
101	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bagunan Kantor	124,513,000	123,145,964	98.90	100.00
	Sekretaris	10,000,000			100
	UPTD Pelabuhan WII I	4,600,000			100
	UPTD Pelabuhan WII II	1,000,000			100
	UPTD PPMHP (Lab)	50,000,000			100
	UPTD PPBL (Bojo)	40,500,000			100
	CDK Maminasata	1,000,000			100
	CDK Pangkajene	3,485,000			100
	CDK Wilayah Selatan	2,000,000			100
	CDK Ajatappareng	3,925,000			100
	CDK Luwu Raya	6,003,000			100
	CDK Bosowasi	1,000,000			100
	CDK Selayar	1,000,000			100
102	Penyediaan Makanan dan Minuman	1,498,125,000	1,233,501,000	82.34	92.35
	Sekretaris	1,053,100,000			90.10
	UPTD Pelabuhan WII I	27,000,000			100
	UPTD Pelabuhan WII II	18,700,000			86.10
	UPTD PPMHP (Lab)	140,150,000			100
	UPTD PPBL (Bojo)	10,000,000			100
	CDK Maminasata	109,850,000			100
	CDK Pangkep	45,750,000			100
	CDK Wilayah Selatan	22,000,000			100
	CDK Ajatappareng	7,900,000			100
	CDK Luwu Raya	11,800,000			100
	CDK Bosowasi	28,050,000			100
	CDK Selayar	23,825,000			67.26
103	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	180,000,000	169,965,800	94.43	95
	Sekretaris				
104	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1,109,000,000	1,087,375,472	98.05	99.85
	Dinas	391,000,000			100
	UPTD Pelabuhan WII I	116,000,000			99.87
	UPTD Pelabuhan WII II	50,000,000			97.08
	UPTD PPMHP (Lab)	114,000,000			100
	UPTD PPBL (Bojo)	60,000,000			100
	CDK Maminasata	60,000,000			100
	CDK Pangkep	128,000,000			100
	CDK Wilayah Selatan	26,000,000			100
	CDK Ajatappareng	54,000,000			100
	CDK Luwu Raya	35,000,000			100
	CDK Bosowasi	37,000,000			100
	CDK Selayar	38,000,000			100
VI	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5,310,745,980	4,995,080,423	94.06	99.89

105	Pemeliharaan Rutin /berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas	225,000,000	224,574,000	99.81	100.00
	Sekretaris	25,000,000			100
	CDK Maminasata	100,000,000			100
	CDK Pangkep	100,000,000			100
106	Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor/Asrama	2,745,993,000	2,723,192,500	99.17	100.00
	Sekretaris	390,000,000			100
	UPTD Pelabuhan WII I	400,000,000			100
	UPTD Pelabuhan WII II	84,860,000			100
	UPTD PPMHP (Lab)	300,000,000			100
	UPTD PPBL (Bojo)	103,070,000			100
	CDK Maminasata	480,000,000			100
	CDK Wilayah Selatan	38,063,000			100
	CDK Ajatapareng	200,000,000			100
	CDK Luwu Raya	50,000,000			100
	CDK Pangkep	400,000,000			100
	CDK Bosowasi	300,000,000			100
107	Pemeliharaan Rutin /berkala Dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan	929,415,000	701,512,093	75.48	99.62
	Jabatan/Dinas				
	Sekretaris	527,750,000			100
	UPTD Pelabuhan WII I	54,000,000			93.52
	UPTD Pelabuhan WII II	26,000,000			100
	UPTD PPMHP (Lab)	111,000,000			100
	UPTD PPBL (Bojo)	59,815,000			100
	CDK Maminasata	15,000,000			100
	CDK Pangkajene	26,000,000			100
	CDK Wilayah Selatan	17,000,000			100.00
	CDK Ajatapareng	39,850,000			99.87
	CDK Luwu Raya	14,000,000			100
	CDK Bosowasi	10,000,000			100
	CDK Selayar	29,000,000			100
108	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	123,050,000	122,140,000	99.26	100
	Sekretaris	61,800,000			100
	CDK Luwu Raya	31,750,000			100
	UPTD PPBL (Bojo)	29,500,000			100
109	Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	15,000,000	3,325,000	22.17	100
	Sekretaris	15,000,000.00			
110	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,214,788,000	1,171,091,830	96.40	100.00
	Dinas	332,800,000			100
	UPTD Pelabuhan WII I	76,000,000			100
	UPTD Pelabuhan WII II	62,500,000			100
	UPTD PPMHP (Lab)	373,000,000			100
	CDK Maminasata	43,000,000			100
	CDK Pangkajene	97,000,000			100
	CDK Wilayah Selatan	28,500,000			100
	CDK Ajatapareng	42,000,000			100
	CDK Luwu Raya	86,988,000			100
	CDK Bosowasi	44,500,000			100
	CDK Selayar	28,500,000			100
111	Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan dan Peralatan kantor	57,499,980	49,245,000	85.64	96.10
	Dinas	37,499,980			100
	UPTD Pelabuhan WII I	2,000,000			100
	UPTD Pelabuhan WII II	2,000,000			100
	UPTD PPMHP (Lab)	2,000,000			100
	UPTD PPBL (Bojo)	2,000,000			0.00
	CDK Maminasata	2,000,000			100
	CDK Pangkajene	2,000,000			100
	CDK Wilayah Selatan	2,000,000			100
	CDK Luwu Raya	2,000,000			88.00
	CDK Bosowasi	2,000,000			100
	CDK Selayar	2,000,000			100
VII	PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	1,601,675,600	1,528,313,325	95.42	97.41
112	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	10,450,000	10,450,000	100	100
113	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	625,108,900	620,335,125	99.24	100.00
114	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan	213,116,700	191,029,400	89.64	100.00

	DAK				
115	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	500,000,000	494,919,800	98.98	100
116	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	252,000,000	210,579,000	83.56	83.56
117	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
VIII	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	6,700,000	3,000,000	44.78	100
118	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretaris	6,700,000	3,000,000	44.78	100
B.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24,236,860,000.00	24,201,081,332	99.85	99.85
	T O T A L	75,508,118,674.99	72,656,900,395	96.22	98.59

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

1. Hilirisasi Perikanan (Prioritas)

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.116.905.106,99,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.212.459.551,- (96.40%) dengan realisasi fisik 97.87 %, Adapun tujuan program adalah Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing dengan hasil kegiatan adalah Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan 100 unit, Inovasi Teknologi Kebun Bibit Rumput Laut 6 unit, pengendalian penggunaan pakan dan obat-obatan dst...(dapat dilihat pada halaman lampiran PKK)

2. Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.547.235.000,- dengan realisasi keuangan Rp 1.333.764.395,- (86.20%) dengan realisasi fisik 88.75 %, adapun tujuan program adalah Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing dengan hasil kegiatan adalah dokumen standarisasi fasilitas Pelabuhan Perikanan Kewenangan provinsi 1 dokumen, unit usaha perbenihan yang melakukan penerapan CPIB 15

unit, Laporan verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis pelabuhan perikanan dst...(dapat dilihat pada halaman lampiran PKK)

3. Penerapan Mutu Pengembangan usaha dan Daya saing

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 249.060.000,- dan realisasi keuangan Rp. 244.990.317,-. Sasaran program meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan hasil kegiatan adalah pelaku usaha yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik sebanyak 30 orang, laporan verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha pengolahan dan pemasar 100 laporan dst...(dapat dilihat pada halaman lampiran PKK)

4. Program Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.214.195.800,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 8.907.004.877,- (96.67%) dengan realisasi fisik 98.29 %. Sasaran program adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan, dan meningkatnya kelestarian dan pengendalian dan pemanfaatan SDKP. Hasil kegiatan diantaranya adalah sarana dan prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebanyak 7 unit, sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan daerah 2 unit, prasarana pulau-pulau kecil 2 unit, dst...(dapat dilihat pada halaman lampiran PKK).

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.224.741.188,- dengan realisasi keuangan Rp. 7.231.206.175,- (98,47%) dengan realisasi fisik 98,47 %, sasaran program ini adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan hasil

terlayannya kebutuhan kantor (listri, air dan internet) 12 bulan , pajak kendaraan 12 bulan, Alat tulis kantor selama 12 bulan dst...(dapat dilihat pada halaman lampiran PKK)

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.310.745.980,- dengan realisasi Rp. 4.995.080.423,- (94,06 %) dan fisik 99,89 % . Sasaran program adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hasil kegiatan adalah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara 14 unit, perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia 22 unit, dst...(dapat dilihat pada halaman lampiran PKK)

7. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Pada Tahun 2019 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.691.675.600,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.528.313.325,- (95.42%) dengan realisasi fisik 97.41 %. Sasaran program adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hasil kegiatan adalah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun 4 dokumen, Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan 2 dokmen dst...(dapat dilihat pada halaman lampiran PKK)

d. Penghargaan yang Diterima

Keberhasilan yang diraih ditahun 2019 adalah dengan diterimanya penghargaan:

1. Keberhasilan yang diraih ditahun 2019 adalah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Kategori Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 10 Desember 2019.



2. Juara Harapan 1 Stand Terbaik Kategori OPD Sulawesi Selatan pada acara Pameran Pembangunan Expo SULSEL 2019



3. Penghargaan sebagai Satker Terbaik ke tiga pengelolaah dana dekonsetrasi tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit organisasi lingkup Pemerintah Sulawesi Selatan yang diwajibkan membuat Laporan Kinerja Tahun 2019 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 dilihat dari capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran strategis yaitu realisasi presentase rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah **Tinggi** dan **Efisien**.
- b. Predikat kinerja "**Tinggi**" akibat terdapat realisasi indikator kinerja yang telah jauh melampaui target tahun berjalan bahkan target akhir RPJMD yaitu produksi perikanan kelompok nelayan, rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial karena menggunakan baseline data 2017 (data 2018 belum tersedia) sehingga perlu dilakukan revisi target indikator sesuai dengan data terbaru pada revisi dokumen RENSTRA berikutnya
- c. Terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target seperti kontribusi PDRB sektor perikanan, produksi perikanan, cakupan bina kelompok nelayan, NTN hal ini perlu menjadi perhatian.

- d. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan tahun 2019 dengan jumlah anggaran APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 51.271.258.674,99,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.455.819.063,- (94,51 %) dan realisasi fisik 98,22 %

